PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Senin Tanggal: 18 Mei 2015 Halaman: 18

Yogya Integrasikan Sistem Informasi Manajemen

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengintegrasikan semua sistem informasi manajemen (SIM). Integrasi sistem ini akan berbasis teknologi informasi.

Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIT) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Sukadarisman mengatakan, integrasi ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, sehingga menjadi lebih efisien dan sistematis. "Tahun ini kita mulai dari SIM internal dulu," kata dia, Ahad (17/5).

Menurut Sukadarisman, integrasi internal akan dimulai dari SIM pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah satunya adalah SIM penganggaran. Ia mengatakan, integrasi SIM penganggaran dilakukan agar saat penyusunan anggaran bisa langsung dipilah secara sistematis sejak awal. "Misalkan setiap SKPD yang ada anggaran untuk lelang, maka sejak penganggarannya akan langsung masuk ke layanan pengadaan atau lelang melalui *e-procurement* (sistem elektronik)," ujar dia.

Kemudian, menurut Sukadarisman, SIM kepegawaian. SIM ini, kata dia, akan terintegrasi secara sistematis di setiap SKPD, sehingga kebutuhan kepegawaian akan langsung diketahui dari awal. Selepas integrasi SIM internal ini terlaksana, ia mengatakan, pemkot baru akan membangun integrasi layanan publik pada tahun mendatang.

Sukadarisman mengatakan, integrasi SIM layanan publik yang akan dilakukan pada 2016 itu di antaranya terkait kependudukan. Yaitu, penggabungan nomor induk Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai *single identity* atau identitas tunggal, dengan data-data layanan publik kependudukan. Ia mengatakan, seperti layanan kependudukan di Dinas Perizinan terkait izin, atau terkait layanan kesehatan dari Dinas Kesehatan.

Dengan integrasi layanan publik melalui identitas tunggal KTP ini, kata Sukadarisman, diharapkan setiap penduduk akan mengetahui hak dan kewajibannya secara *online*. Misalnya, ia mengatakan, ketika warga mengurus izin HO (izin gangguan) di Dinas Perizinan. "Maka nanti akan ada pemberitahuan di layanan Dinzin bahwa yang bersangkutan belum membayar pajak PBB dan sebagainya," ujar dia.

Begitu pula terkait hak warga. Sukadarisman mencontohkan, jika warga mendaftarkan diri untuk pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Maka, kata dia, nantinya akan ada pemberitahuan mengenai informasi tertentu, seperti hak warga terkait dana bantuan. Ia mengatakan, integrasi SIM ini nantinya akan dibangun dalam dua tahun anggaran. "Integrasi SIM ini kita bangun sendiri tanpa pihak ketiga," kata dia.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005